



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG**

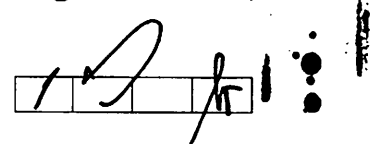
**PENDELEGASIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN OLEH BUPATI LAMANDAU  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lamandau di Bidang Pelayanan Perizinan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pendelegasian Perizinan Dan Non Perizinan Oleh Bupati Lamandau Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08.Ah.01.01.2009; Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
19. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains several small, illegible characters and symbols, including what appears to be a date or code.

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Setifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusahan Sektor Pertanian;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Perdagangan;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal.

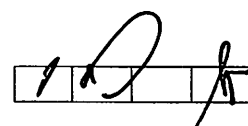
#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN OLEH BUPATI LAMANDAU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Daerah adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lamandau.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap



permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
12. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan Non Perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu atau kepada PD teknis.
13. Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mengelola pelayanan perizinan dan Non Perizinan.
14. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah Standar Pelayanan Publik dilingkungan DPMPTSP.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Standar Operasional Prosedur dilingkungan DPMPTSP.
16. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.
18. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

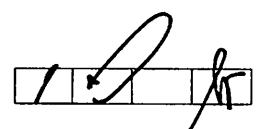
#### **Pasal 2**

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Terpadu satu Pintu, adalah sebagai upaya:

- a. terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

#### **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Daerah.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a small emblem.

**BAB III**  
**PELIMPAHAN KEWENANGAN**  
**Pasal 4**

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat dan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Melalui Online Single Submission (OSS).
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas berkewajiban untuk:

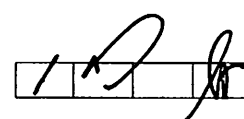
- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non Perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait tata perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati yang ditembuskan kepada instansi terkait lainnya.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN KEWENANGAN**  
**Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat dari PD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

**Pasal 7**

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada SPP dan SOP.
- (2) SPP dan SOP sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



**BAB V**  
**PENGADUAN**  
**Pasal 8**

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala DPMPTSP, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 9**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan PD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di BPPTPM dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Masing-masing PD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 10**

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

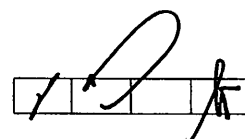
Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

**Pasal 12**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendelegasian Wewenang Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 523) dan Peraturan pelaksanaan dibawahnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 23 Mei 2019**

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

**Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 23 Mei 2019**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**MASRUN**

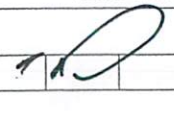
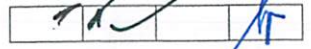
**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2019 NOMOR 600**

|                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KASUBAG<br>PERATURAN PER-<br>UNDANG - UNDANGAN | TGL DOKUMEN<br>27 - 05 - 2019                                                                  |
|                                                | PARAF<br> |

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR 14 TAHUN 2019**  
**TANGGAL 23 MEI 2019**  
**TENTANG PENDELEGASIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN OLEH BUPATI**  
**LAMANDAU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU**

**JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**  
**YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU**

| No.       | SEKTOR                    | JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA |                                                                     | Jenis Izin                 |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1         | 2                         | 3                                         |                                                                     | 4                          |
| <b>I</b>  | <b>Sektor Perdagangan</b> |                                           | <b>PERIZINAN BERUSAHA</b>                                           |                            |
|           |                           | 1                                         | Izin Usaha Perdagangan                                              | <b>Izin Usaha</b>          |
|           |                           | 2                                         | Tanda Daftar Perusahaan (TDP)                                       | NIB                        |
|           |                           | 3                                         | Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa        | Izin Usaha                 |
|           |                           | 4                                         | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)                             | Izin Usaha                 |
|           |                           | 5                                         | Tanda Daftar Gudang (TDG)                                           | Izin Usaha                 |
|           |                           | 6                                         | Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A             | Izin Usaha                 |
|           |                           | 7                                         | Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat MB Gol A (SKPL-A) | Izin Usaha                 |
|           |                           | 8                                         | Angka Pengenal Importir (API)                                       | NIB                        |
|           |                           | 9                                         | Izin Distributor Pupuk Bersubsidi dan Non Bersubsidi                | Izin Usaha                 |
|           |                           |                                           | <b>NON BERUSAHA</b>                                                 |                            |
|           |                           | 1                                         | Tanda Daftar Industri                                               | Tanda Daftar               |
|           |                           | 2                                         | Izin Pemakaian Kios/Lapak                                           | Izin Pemakaian             |
|           |                           | 3                                         | Izin Penggilingan Padi                                              | Izin                       |
|           |                           | 4                                         | Izin Pasar                                                          | Izin                       |
| <b>II</b> | <b>Sektor Kesehatan</b>   |                                           | <b>PERIZINAN BERUSAHA</b>                                           |                            |
|           |                           | 1                                         | Izin Toko Alat Kesehatan                                            | Izin Komersial/Operasional |
|           |                           | 2                                         | Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D dan Kelas C                     | Izin Usaha                 |
|           |                           | 3                                         | Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D dan Kelas C                    | Izin Komersial/Operasional |
|           |                           | 4                                         | Izin Operasional Klinik                                             | Izin Komersial/Operasional |
|           |                           | 5                                         | Izin Apotek                                                         | Izin Usaha                 |

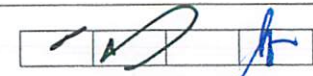
  


|            |                               |    |                                                           |                            |
|------------|-------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|            |                               | 6  | Izin Toko Obat                                            | Izin Usaha                 |
|            |                               |    | <b>NON BERUSAHA</b>                                       |                            |
|            |                               | 1  | Izin Penyelenggaraan Optik                                | Izin Penyelenggara         |
|            |                               | 2  | Izin Praktek Dokter                                       | Izin Praktek               |
|            |                               | 3  | Izin Praktek Bidan                                        | Izin Praktek               |
|            |                               | 4  | Izin Praktek Perawat                                      | Izin Praktek               |
|            |                               | 5  | Izin Praktek Gizi                                         | Izin Praktek               |
|            |                               | 6  | Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut                       | Izin Praktek               |
|            |                               | 7  | Izin Praktek Apoteker                                     | Izin Praktek               |
|            |                               | 8  | Izin Praktek Fisioterapis                                 | Izin Praktek               |
|            |                               | 9  | Izin Pelayanan Sehat Pakai Air                            | Izin Pelayanan             |
|            |                               | 10 | Izin Praktek Okupasi Terapis                              | Izin Praktek               |
|            |                               | 11 | Izin Praktek Terapis Wicara                               | Izin Praktek               |
|            |                               | 12 | Izin Praktek Refraksionis Optisien                        | Izin Praktek               |
|            |                               | 13 | Izin Praktek Radiografer                                  | Izin Praktek               |
|            |                               | 14 | Izin Bagi Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif       | Izin Kerja                 |
|            |                               | 15 | Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat               | Izin Operasional           |
|            |                               | 16 | Surat Tanda Daftar Pengobatan Tradisional                 | Sertifikat                 |
|            |                               | 17 | Surat Izin Pengobatan Tradisional                         | Izin Praktek               |
|            |                               | 18 | Surat Izin Higienis Sanitasi Depot Air Minum              | Sertifikat                 |
| <b>III</b> | <b>Sektor Perhubungan</b>     |    | <b>PERIZINAN BERUSAHA</b>                                 |                            |
|            |                               | 1  | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang                       | Izin Usaha                 |
|            |                               | 2  | Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan              | Izin Usaha                 |
|            |                               | 3  | Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau                      | Izin Usaha                 |
|            |                               | 4  | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu lintas (ANDALALIN) | Izin Komersial/Operasional |
|            |                               | 5  | Sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor          | Izin Komersial/Operasional |
|            |                               |    | <b>NON BERUSAHA</b>                                       |                            |
|            |                               | 1  | Izin Angkutan Bermotor                                    | Izin Angkutan              |
|            |                               | 2  | Izin Angkutan Barang Khusus                               | Izin Angkutan              |
|            |                               | 3  | Izin Trayek Darat/Sungai                                  | Izin Trayek                |
|            |                               | 4  | Izin Trayek Angkutan Pedesaan                             | Izin Angkutan              |
|            |                               | 5  | Izin Usaha Angkutan Bermotor                              | Izin Angkutan              |
| <b>IV</b>  | <b>Sektor Ketenagakerjaan</b> |    | <b>PERIZINAN BERUSAHA</b>                                 |                            |
|            |                               | 1  | BPJS Ketenagakerjaan                                      | Pendaftaran                |

|          |                            |    |                                                         |                              |
|----------|----------------------------|----|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|          |                            | 2  | Pengesahan RPTKA                                        | Pendaftaran                  |
|          |                            | 3  | Izin Kantor Cabang                                      | Izin Usaha                   |
|          |                            | 4  | Izin Tempat Penampungan                                 | Izin Usaha                   |
|          |                            | 5  | Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta       | Izin Usaha                   |
|          |                            | 6  | Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga  | Izin Usaha                   |
|          |                            | 7  | Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)                      | Izin Usaha                   |
|          |                            | 8  | Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh | Izin Operasional / Komersial |
|          |                            |    | <b>NON BERUSAHA</b>                                     |                              |
|          |                            | 1  | Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja                  | Izin Pendirian               |
| <b>V</b> | <b>Sektor Kepariwisata</b> |    | <b>PERIZINAN BERUSAHA</b>                               |                              |
|          |                            | 1  | Izin Pengelolaan Museum                                 | Izin Usaha                   |
|          |                            | 2  | Izin Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala      | Izin Usaha                   |
|          |                            | 3  | Izin Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami              | Izin Usaha                   |
|          |                            | 4  | Izin Wisata Agro                                        | Izin Usaha                   |
|          |                            | 5  | Izin Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat    | Izin Usaha                   |
|          |                            | 6  | Izin Pengelolaan Objek Ziarah                           | Izin Usaha                   |
|          |                            | 7  | Izin Kawasan Pariwisata                                 | Izin Usaha                   |
|          |                            | 8  | Izin Angkutan Jalan Wisata                              | Izin Usaha                   |
|          |                            | 9  | Izin Angkutan Wisata di Sungai dan Danau                | Izin Usaha                   |
|          |                            | 10 | Izin Agen Perjalanan Wisata                             | Izin Usaha                   |
|          |                            | 11 | Izin Biro Perjalanan Wisata                             | Izin Usaha                   |
|          |                            | 12 | Izin Restoran                                           | Izin Usaha                   |
|          |                            | 13 | Izin Rumah Makan                                        | Izin Usaha                   |
|          |                            | 14 | Izin Jasa Boga                                          | Izin Usaha                   |
|          |                            | 15 | Izin Pusat Penjualan Makanan                            | Izin Usaha                   |
|          |                            | 16 | Izin Bar/Pub                                            | Izin Usaha                   |
|          |                            | 17 | Izin Kafe                                               | Izin Usaha                   |
|          |                            | 18 | Izin Hotel                                              | Izin Usaha                   |
|          |                            | 19 | Izin Pondok Wisata                                      | Izin Usaha                   |
|          |                            | 20 | Izin Bumi Perkemahan                                    | Izin Usaha                   |
|          |                            | 21 | Izin Persinggahan                                       | Izin Usaha                   |
|          |                            | 22 | Izin Vila                                               | Izin Usaha                   |
|          |                            | 23 | Izin Kondominium Hotel                                  | Izin Usaha                   |
|          |                            | 24 | Izin Apartemen Servis                                   | Izin Usaha                   |
|          |                            | 25 | Izin Rumah Wisata                                       | Izin Usaha                   |



|  |  |    |                                                                             |            |
|--|--|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  | 26 | Izin Jasa Manajemen Hotel                                                   | Izin Usaha |
|  |  | 27 | Izin Hunian Wisata Senior / Lanjut Usia                                     | Izin Usaha |
|  |  | 28 | Izin Sanggar Seni                                                           | Izin Usaha |
|  |  | 29 | Izin Jasa Impresariat / Promotor                                            | Izin Usaha |
|  |  | 30 | Izin Galeri Seni / Pertunjukan Seni                                         | Izin Usaha |
|  |  | 31 | Izin Rumah Bilyar                                                           | Izin Usaha |
|  |  | 32 | Izin Lapangan Golf                                                          | Izin Usaha |
|  |  | 33 | Izin Gelanggang Bowling                                                     | Izin Usaha |
|  |  | 34 | Izin Gelanggang Renang                                                      | Izin Usaha |
|  |  | 35 | Izin Lapangan Sepak Bola / Futsal                                           | Izin Usaha |
|  |  | 36 | Izin Lapangan Tennis                                                        | Izin Usaha |
|  |  | 37 | Izin Wisata Olahraga Minat Khusus                                           | Izin Usaha |
|  |  | 38 | Izin Wisata Petualangan Alam                                                | Izin Usaha |
|  |  | 39 | Izin Taman Bertema                                                          | Izin Usaha |
|  |  | 40 | Izin Taman Rekreasi                                                         | Izin Usaha |
|  |  | 41 | Izin Kelab Malam                                                            | Izin Usaha |
|  |  | 42 | Izin Diskotik                                                               | Izin Usaha |
|  |  | 43 | Izin Karaoke                                                                | Izin Usaha |
|  |  | 44 | Izin Arena Permainan                                                        | Izin Usaha |
|  |  | 45 | Izin Panti / Rumah Pijat                                                    | Izin Usaha |
|  |  | 46 | Izin Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran | Izin Usaha |
|  |  | 47 | Izin Jasa informasi Pariwisata                                              | Izin Usaha |
|  |  | 48 | Izin Konsultan Pariwisata                                                   | Izin Usaha |
|  |  | 49 | Izin Pramuwisata                                                            | Izin Usaha |
|  |  | 50 | Izin Wisata Arung Jeram                                                     | Izin Usaha |
|  |  | 51 | Izin wisata Selam                                                           | Izin Usaha |
|  |  | 52 | Izin Wisata Dayung                                                          | Izin Usaha |
|  |  | 53 | Izin Wisata Selancar                                                        | Izin Usaha |
|  |  | 54 | Izin Wisata Olahraga Tirta                                                  | Izin Usaha |
|  |  | 55 | Izin Wisata Memancing                                                       | Izin Usaha |
|  |  | 56 | Izin Dermaga Wisata                                                         | Izin Usaha |
|  |  | 57 | Izin SPA                                                                    | Izin Usaha |
|  |  |    | <b>NON BERUSAHA</b>                                                         |            |
|  |  | 1  | Izin Persewaan Audio Visual, VCD dan sejenis Play Station, TV kabel.        | Izin Sewa  |

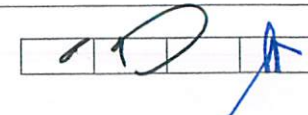


| VI   | Sektor Pertanian dan Perikanan             |    | PERIZINAN BERUSAHA                                                                                                     |                                        |
|------|--------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|      |                                            | 1  | IUP-B, IUP-P, IUP dan Izin Usaha Perbenihan Tanaman                                                                    | Digabung Menjadi Izin Usaha Perkebunan |
|      |                                            | 2  | Izin Usaha Obat Hewan                                                                                                  | Izin Usaha                             |
|      |                                            | 3  | Izin Usaha Tanaman Pangan                                                                                              | Izin Usaha                             |
|      |                                            | 4  | Izin Usaha Hortikultura                                                                                                | Izin Usaha                             |
|      |                                            | 5  | Izin Usaha Perternakan                                                                                                 | Izin Usaha                             |
|      |                                            | 6  | Pendaftaran Usaha Perkebunan (skala kecil)                                                                             | Izin Usaha                             |
|      |                                            | 7  | Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan                                                                                       | Izin Usaha                             |
|      |                                            | 8  | Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura                                                                                | Izin Usaha                             |
|      |                                            | 9  | Pendaftaran Usaha Peternakan                                                                                           | Izin Usaha                             |
|      |                                            | 10 | Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman                                                                           | Izin Komersial/Operasional             |
|      |                                            | 11 | Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak                                                                      | Izin Komersial/Operasional             |
|      |                                            | 12 | Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan                                                                              | Izin Komersial/Operasional             |
|      |                                            | 13 | Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan                                                                        | Izin Komersial/Operasional             |
|      |                                            | 14 | Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi                                                       | Izin Komersial/Operasional             |
|      |                                            |    | <b>NON BERUSAHA</b>                                                                                                    |                                        |
|      |                                            | 1  | Izin Penangkaran Walet                                                                                                 | Izin Penangkaran                       |
|      |                                            | 2  | Izin Usaha Peternakan                                                                                                  | Izin Peternakan                        |
|      |                                            | 3  | Izin Rumah Potong Hewan                                                                                                | Izin Rumah Potong Hewan                |
|      |                                            | 4  | Izin Usaha Perikanan                                                                                                   | Izin Perikanan                         |
|      |                                            | 5  | Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STB)                                                                           | Tanda Daftar                           |
|      |                                            | 6  | Izin Tempat Pemotongan Hewan                                                                                           | Izin TPH                               |
|      |                                            | 7  | Surat Izin Penangkapan Ikan Perikanan                                                                                  | SIPI                                   |
|      |                                            | 8  | Surat Izin Pembudidayaan Ikan Perikanan                                                                                | SIPBI                                  |
|      |                                            | 9  | Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan                                                                                       | SIKPI                                  |
| VII  | Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan      |    | PERIZINAN BERUSAHA                                                                                                     |                                        |
|      |                                            | 1  | Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil (Kegiatan Penyimpanan LB3) | Izin Komersial/Operasional             |
|      |                                            | 2  | Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL)                                        | Izin Usaha                             |
|      |                                            | 3  | Izin Pembuangan Air Limbah                                                                                             | Izin Komersial/Operasional             |
|      |                                            | 4  | Izin Lingkungan                                                                                                        | Izin Usaha                             |
| VIII | Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    | PERIZINAN BERUSAHA                                                                                                     |                                        |
|      |                                            | 1  | Izin Usaha Jasa Konstruksi                                                                                             | Izin Usaha                             |



|           |                                          |    |                                                                |                            |
|-----------|------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|           |                                          | 2  | Izin Mendirikan Bangunan                                       | Komitmen Izin Usaha        |
|           |                                          | 3  | Surat Izin Peil Banjir                                         | Komitmen Izin Usaha        |
|           |                                          | 4  | Sertifikat Laik Fungsi                                         | Komitmen Izin Usaha        |
|           |                                          |    | <b>NON BERUSAHA</b>                                            | Izin Usaha                 |
|           |                                          | 1  | Izin Perubahan Peruntukan Tanah                                | IPPT                       |
|           |                                          |    | Izin Penyewaan Alat Berat                                      | Izin Penyewaan             |
|           |                                          |    | Izin Tempat Pemakaman                                          | Izin Tempat Pemakaman      |
|           |                                          |    | Izin Tempat Pembuangan Akhir dan Pelayanan Angkutan Kebersihan | Izin Tempat Pembuangan     |
|           |                                          |    | Izin Pelayanan Angkutan di Bidang Kebersihan                   | Izin Angkutan              |
|           |                                          |    | Izin Pengelolaan Sampah dan Air Kotor                          | Izin Pengelolaan           |
|           |                                          |    | Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau                    | Izin Pemakaian Lokasi      |
|           |                                          |    | Izin Mengangkut Jenazah Keluar Wilayah Kabupaten Lamandau      | Izin Angkut                |
|           |                                          |    | Izin Usaha Jasa Pelayanan Pemakaman                            | Izin Jasa                  |
|           |                                          |    | Izin Usaha Angkutan Jenazah                                    | Izin Angkut                |
|           |                                          |    | Izin Rumah Kost                                                | Izin Rumah Kost            |
|           |                                          |    | Izin Usaha Pemanfaatan Ruang (IPPR)                            | Izin Pemanfaatan           |
| <b>IX</b> | <b>Sektor Komunikasi dan Informatika</b> |    | <b>PERIZINAN BERUSAHA</b>                                      | Izin Komersial/Operasional |
|           |                                          | 1  | Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio                       | Izin Komersial/Operasional |
|           |                                          | 2  | Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi              | Izin Komersial/Operasional |
|           |                                          | 3  | Perizinan Penyelenggaraan Pos                                  | Izin Komersial/Operasional |
|           |                                          | 4  | Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi                  | Izin Komersial/Operasional |
|           |                                          | 5  | Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TV dan Radio                    | Izin Komersial/Operasional |
|           |                                          | 6  | Lembaga Penyiaran Berbayar (TV                                 | Izin Komersial/Operasional |
|           |                                          | 7  | Lembaga Penyiaran Komunitas (TV dan Radio)                     | Izin Komersial/Operasional |
|           |                                          | 8  | Lembaga Penyiaran Publik Lokal (TV dan Radio)                  | Izin Komersial/Operasional |
|           |                                          |    | <b>NON BERUSAHA</b>                                            |                            |
|           |                                          | 1  | Izin Warung Telekomunikasi                                     | Izin Wartel                |
|           |                                          | 2  | Izin Instalatur Kable Rumah dan Gedung                         | Izin IKR/G                 |
|           |                                          | 3  | Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator                | Izin Kantor Cabang         |
|           |                                          | 4  | Izin Instalansi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi          | Izin Instalansi            |
|           |                                          | 5  | Izin Instalansi Genset Menara Telekomunikasi                   | Izin Instalansi            |
|           |                                          | 6  | Izin Penggalian Kabel Telekomunikasi                           | Izin Pengalihan            |
|           |                                          | 7  | Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi                       | Izin Penempatan Perangkat  |
|           |                                          | 8  | Izin TV Kabel                                                  | Izin TV Kabel              |
|           |                                          | 9  | Izin Warung Internet                                           | Izin Warnet                |
|           |                                          | 10 | Izin Pendirian Menara Telekomunikasi                           | Izin Pendirian             |
| <b>XI</b> | <b>Sektor Pendidikan dan Kebudayaan</b>  |    | <b>PERIZINAN BERUSAHA</b>                                      |                            |

|             |                                                                 |   |                                                                                 |                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|             |                                                                 | 1 | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat    | Izin Usaha                 |
|             |                                                                 | 2 | Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK                         | Izin Komersial/Operasional |
|             |                                                                 | 3 | Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama                                    | Izin Komersial/Operasional |
|             |                                                                 | 4 | Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal                                      | Izin Komersial/Operasional |
|             |                                                                 | 5 | Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dengan Modal Asing                   | Izin Komersial/Operasional |
|             |                                                                 | 6 | Izin Usaha Pengedaran Film                                                      | Izin Usaha                 |
|             |                                                                 | 7 | Izin Usaha Pertunjukan Film                                                     | Izin Usaha                 |
|             |                                                                 | 8 | Izin Usaha Penjualan dan/atau Penyewaan Film                                    | Izin Usaha                 |
|             |                                                                 |   | <b>NON BERUSAHA</b>                                                             |                            |
|             |                                                                 | 1 | Izin Taman Bacaan Masyarakat                                                    | Izin Taman Bacaan          |
|             |                                                                 | 2 | Izin Usaha Sanggar Budaya                                                       | Tanda Daftar Usaha Sanggar |
| <b>XII</b>  | <b>Sektor Agama dan Keagamaan</b>                               |   | <b>PERIZINAN BERUSAHA</b>                                                       |                            |
|             |                                                                 | 1 | Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan                                      | Izin Komersial/Operasional |
|             |                                                                 | 2 | Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus   | Izin Komersial/Operasional |
|             |                                                                 | 3 | Izin Penyelenggaraan Ibadah Umrah bagi Penyelenggara Ibadah Umrah               | Izin Komersial/Operasional |
|             |                                                                 | 4 | Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)                                       | Izin Komersial/Operasional |
| <b>XIII</b> | <b>Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b> |   | <b>PERIZINAN BERUSAHA</b>                                                       |                            |
|             |                                                                 | 1 | Izin Koperasi Simpan Pinjam                                                     | Izin Usaha                 |
|             |                                                                 | 2 | Izin Usaha Mikro dan Kecil                                                      | Izin Usaha                 |
|             |                                                                 | 3 | Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam                             | Izin Komersial/Operasional |
|             |                                                                 | 4 | Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam                    | Izin Komersial/Operasional |
|             |                                                                 | 5 | Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam                                | Izin Komersial/Operasional |
|             |                                                                 |   | <b>NON BERUSAHA</b>                                                             |                            |
|             |                                                                 | 1 | Izin Koperasi Bukan Simpan Pinjam                                               | Izin Koperasi              |
|             |                                                                 | 2 | Izin Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu Koperasi Bukan Simpan Pinjam | Izin Kantor                |
|             |                                                                 | 3 | Izin Pemakaian Kios / Lapak                                                     | Izin Pemakaian             |
|             |                                                                 | 4 | Izin Penggilingan Padi                                                          | Izin Penggilingan          |
| <b>XIII</b> | <b>Sektor Minyak dan Gas</b>                                    |   | <b>NON BERUSAHA</b>                                                             |                            |
|             |                                                                 | 1 | Izin Pangkalan Elpigi                                                           | Izin Pangkalan             |
|             |                                                                 | 2 | Izin Pengumpul dan Penyaluran Pelumas Bekas                                     | Izin Pengumpul             |
| <b>XIV</b>  | <b>Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>                       |   | <b>NON BERUSAHA</b>                                                             |                            |
|             |                                                                 | 1 | Izin Penelitian                                                                 | Izin Penelitian            |
|             |                                                                 | 2 | Izin Kuliah Kerja Nyata                                                         | Izin KKN                   |
| <b>XIV</b>  | <b>Sektor Sosial</b>                                            |   | <b>NON BERUSAHA</b>                                                             |                            |



|  |   |                                               |                      |
|--|---|-----------------------------------------------|----------------------|
|  | 1 | Izin Pengumpulan Uang atau Barang             | Izin Pengumpulan     |
|  | 2 | Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah  | Izin Penyelenggaraan |
|  | 3 | Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial | Izin Operasional     |
|  | 4 | Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial     | Tanda Daftar         |

**Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 23 Mei 2019**



**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**

**Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 23 Mei 2019**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

**MASRUN**